

Penguatan Wawasan Kebangsaan Peserta Didik di Daerah Perbatasan Indonesia-Timor Leste Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Makarius Erwin Bria

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Pos-el: erwinbria213@gmail.com

Abstrak

Adanya globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang berubah secara cepat di abad ke-21 ini seolah-olah menyamarkan batas antarnegara di dunia. Di sisi lain, globalisasi cenderung bersifat memaksa dan membawa seseorang untuk bergabung di dalam satu komunitas global sehingga dapat dengan cepat bertukar informasi antarindividu. Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan negara Malaysia, PNG, Singapura, dan Timor Leste. Dengan melihat kondisi tersebut tampak semakin perlu adanya penguatan wawasan kebangsaan kepada masyarakat agar mampu mempertahankan eksistensi keindonesiaan itu sendiri. Mengerucut kepada kehidupan masyarakat di daerah perbatasan RI-Timor Leste yang juga berpotensi untuk berinteraksi dengan negara luar, maka penguatan wawasan kebangsaan di daerah perbatasan tersebut merupakan tindakan yang urgen untuk dilakukan agar menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang kokoh dan bulat. Upaya yang dilakukan untuk menguatkan wawasan kebangsaan di daerah perbatasan adalah melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk menambah wawasan kebangsaan dan menumbuhkembangkan semangat persatuan dan kesatuan pada peserta didik. Metode penulisan yang digunakan adalah metode *library research* dengan didukung oleh jurnal penelitian yang relevan. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan pada peserta didik terutama di daerah perbatasan RI-Timor Leste bertujuan untuk menambah wawasan kebangsaan sehingga mampu mempertahankan nasionalisme, identitas bangsa, dan menghindari terjadinya disintegrasi bangsa. Dengan adanya penguatan wawasan kebangsaan dapat membentuk orientasi, sikap, dan perilaku peserta didik sebagai warga negara yang baik (*good citizen*) agar tetap mempertahankan jati diri bangsa demi terciptanya persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

Kata kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Perbatasan, Wawasan Kebangsaan

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang beberapa wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain. Batas wilayah ini meliputi perbatasan darat (kontinen) dan perbatasan laut (maritim). Negara Malaysia, Papua New Guinea, Timor Leste merupakan negara tetangga yang berbatasan darat dengan Indonesia. Sedangkan perbatasan laut mencakup 10 negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia, India, Filipina, Vietnam, Australia, Timor Leste, Papua New Guinea (PNG), Thailand, Republik Palau. Ini berarti, negara Indonesia memiliki banyak wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Daerah perbatasan merupakan wilayah strategis yang menjadi beranda depan negara, dalam hal ini wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Prasojo, 2013:418). Namun, pada kenyataannya pembangunan wilayah perbatasan bisa dikatakan masih jauh dari sentuhan pemerintah. Kondisi masyarakat dan pembangunan infrastruktur penunjang di wilayah perbatasan masih rendah. Oleh karena itu, masyarakat di daerah perbatasan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Tidak hanya itu, pengaruh globalisasi yang berubah begitu cepat juga dapat mempengaruhi masyarakat di daerah perbatasan. Seperti yang dikemukakan oleh Poespowardojo (2003:2), proses Globalisasi sudah dimulai dari tahun 1960-an dan membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Perubahan globalisasi bergerak begitu cepat dan tidak dapat dipungkiri telah melibatkan setiap bangsa di dalamnya. Perkembangan teknologi dan komunikasi bergerak secara cepat. Hal ini juga memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat perbatasan. Adanya teknologi komunikasi dan informasi, setiap individu mampu berkomunikasi dan atau bertukar informasi dengan siapa saja di berbagai tempat. Dengan demikian, masyarakat di daerah perbatasan dapat dengan mudah untuk berinteraksi dengan warga negara tetangga. Hal ini juga, dikhawatirkan dapat melemahkan nasionalisme dari masyarakat perbatasan Indonesia.



Gambar 1 Relasi Nasionalisme dan Globalisasi Terhadap Kedaulatan Bangsa (Soebhan, dkk., 2017:31)

Dari gambar 1, dapat dikatakan bahwa dampak positif, globalisasi dianggap sebagai hal yang sangat menguntungkan dengan menggerakkan semua warga negara untuk bangkit menjadi satu kekuatan dalam tatanan global. Sedangkan, dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme dan kedaulatan bangsa. Globalisasi mampu melunturkan nasionalisme dan identitas bangsa Indonesia. Dengan melihat kondisi seperti ini maka setiap bangsa dan negara harus menentukan sikap dan mengambil suatu kebijakan tersendiri untuk menghadapi perkembangan globalisasi ini

Beberapa isu pokok yang ada di kawasan perbatasan Badau, Kalimantan Barat yakni, *pertama*, proses pembangunan masyarakat penting belum ditangani secara serius sehingga belum maksimal seperti yang diharapkan. *Kedua*, isu hubungan negara dan masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan. Konteks ini sangat berkaitan erat dengan isu kegalauan identitas dan nasionalisme bangsa Indonesia di wilayah perbatasan. Artinya bahwa isu ini perlu diperhatikan dan ditangani dengan segera agar masyarakat di wilayah perbatasan tidak merasa terpinggirkan, melainkan tetap menjadi bagian dari keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ketiga*, isu penting lainnya mengenai hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh negara dan masyarakat. Pembangunan yang telah dilakukan terwujud dalam prakten kehidupan masyarakat dan merupakan manifestasi dari nilai-nilai identitas bangsa (Prasojo, 2013:419).

Apabila kita melihat kondisi wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste di propinsi Nusa Tenggara Timur tidak jauh berbeda dengan isu pokok perbatasan Badau, Kalimantan Barat. Wuryandari (2009: 11) mengidentifikasi beberapa permasalahan pokok di perbatasan Indonesia-Timor Leste yakni, *pertama*, pembangunan pemerintah untuk pengembangan wilayah perbatasan belum dijalankan secara penuh. *Kedua*, pengelolaan masalah keamanan di wilayah perbatasan juga belum diperhatikan oleh pemerintah, sehingga masih menimbulkan konflik antara kedua negara di wilayah perbatasan indonesia-Timor Leste.

Kondisi kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste yang masih terbelakang juga menjadi pemicu terjadinya aktivitas ilegal. Aktivitas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan ini meliputi

penyelundupan barang-barang elektronik, bahan bakar minyak, hewan ternak, bahkan mobil dan motor. Barang yang diselundupkan tersebut dijual dan uang hasil penjualan dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan ekonomi keluarga.

Diantara isu-isu globalisasi yang terus berkembang dan berdampak pada masyarakat di daerah perbatasan, berpengaruh kepada diintegrasikan bangsa, serta berpengaruh pada kesejahteraan dan sikap nasionalisme, maka dibutuhkan suatu pembelajaran yang mengantarkan peserta didik menjadi warga negara yang baik. Globalisasi terus berkembang dan tak dapat dihindari, melainkan harus dihadapi. Oleh karena itu, negara harus menjadi benteng pertahanan yang kuat untuk melindungi kepentingan nasional dan warga negaranya.

Beberapa permasalahan tersebut di atas, tidak dapat dibiarkan begitu saja. Diperlukan adanya upaya untuk menguatkan wawasan kebangsaan masyarakat terutama bagi peserta didik agar dapat menanggulangi kecenderungan negatif yang mengancam kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya penguatan wawasan kebangsaan peserta didik di wilayah perbatasan dilakukan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Melalui pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. (Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003, Penjelasan Pasal 37).

Branson (1998:5) juga memaparkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang dapat membentuk perilaku warga negara yang baik. Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai pendidikan yang berfungsi untuk mengembangkan warga negara yang bertanggung jawab, efektif, dan terdidik. Ini bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berpartisipasi aktif, kritis, dan bertanggung jawab, serta mampu membendung hal-hal negatif yang dapat memudahkan nasionalisme serta tetap terjaganya keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Metode

Metode penulisan ini menggunakan metode *library research*. Metode ini adalah salah satu jenis dari metode penelitian kualitatif. *Library research* juga dapat disebut sebagai riset pustaka yang membatasi pada bahan-bahan koleksi perpustakaan, tanpa memerlukan riset lapangan. Metode ini digunakan untuk menjawab studi pendahuluan (*preliminary research*) untuk memahami lebih mendalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat (Zed, 2004:1). Selanjutnya, menurut Zed (2004: 54), menjelaskan bahwa riset kepustakaan sering adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini

yaitu berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Hal tersebut, didasarkan dengan teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan.

Beberapa jenis literatur utama yang digunakan terdiri atas buku-buku mengenai wawasan kebangsaan, masyarakat perbatasan, pendidikan kewarganegaraan, kemudian didukung oleh beberapa data dari jurnal-jurnal tertentu serta artikel ilmiah, dan artikel lepas dari alamat web terpercaya. Jenis data yang diperoleh bersifat variatif, artinya gabungan dari data kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan *library research*, yaitu mengidentifikasi berbagai referensi yang terkait dengan judul karya tulis. Data atau informasi tersebut, didapatkan dari literatur yang dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya disusun berdasarkan hasil studi, sehingga terkait satu sama lain dan disesuaikan dengan tema yang dibahas.

Analisis data dilakukan secara induktif, yang di dalamnya terdiri dari dua tahap yaitu proses reduksi data dan penyajian data. Reduksi data bertujuan untuk penulis lebih mudah dalam memilih data yang valid, sedangkan penyajian data agar dimungkinkan penarikan simpulan.

Penarikan simpulan didapatkan sesudah merujuk tujuan penulisan, analisis dan sintesis. Simpulan juga memperhatikan penyajian data dari pembahasan yang ditarik merepresentasikan pokok-pokok bahasan dalam karya tulis.

Kajian Masyarakat di Perbatasan

Ada beberapa argumen yang mendukung pernyataan mengenai pentingnya kajian masyarakat lokal di perbatasan (Marsetio, 2012). *Pertama*, daerah perbatasan adalah wilayah strategis yang menjadi wajah sebuah negara, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena wilayah-wilayah tersebut menjadi pintu masuk bagi warga asing atau pihak luar lainnya yang berkepentingan untuk masuk ke wilayah NKRI. *Kedua*, masyarakat perbatasan yang ada di NKRI cenderung masuk dalam kategori masyarakat yang tertinggal dari berbagai aspek pembangunan. *Ketiga*, kajian mengenai masyarakat lokal di wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia belum terlalu menggembirakan baik dari segi jumlah maupun dari segi dampak hasil kajian yang berupa aksi kebijakan pasca kajian.

Perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan di wilayah Nusa Tenggara Timur, sudah dilakukan sejak lama setelah referendum negara Timor Leste. Meskipun pembangunan sudah dilakukan, namun belum maksimal seperti yang diharapkan. Sentuhan pembangunan yang masih jauh dari harapan dapat dilihat dari keterbatasan infrastruktur yang belum memadai.

Ada 5 (lima) wilayah kabupaten yang berbatasan darat dengan negara Timor Leste, yakni Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka. Muta'ali (2014:33) mengemukakan bahwa kawasan perbatasan darat merupakan kawasan yang strategis untuk ditingkatkan pembangunannya.

Keamanan perbatasan Indonesia dan Timor Leste berpotensi muncul akibat diabaikannya *human security* di wilayah perbatasan. Pembangunan di wilayah perbatasan terkesan lamban apabila dibandingkan dengan negara tetangga. Kondisi masyarakat perbatasan di wilayah kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, Kupang, Malaka, Alor, dan Rote Ndao tergolong rendah. Dalam hal ini, kesejahteraan ekonomi, kondisi sosial, kesehatan dan pendidikan belum memadai (Wuryandari, 2009:11).

Apabila dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, Daerah perbatasan merupakan wilayah dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga proses pembangunan dan pengendalian masyarakat sulit untuk dilakukan secara efektif dan efisien. Namun, bentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan jika tidak segera ditangani dengan baik maka akan berdampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional baik secara langsung dan tidak langsung.

Melihat kenyataan ini, maka seharusnya pemerintah Indonesia memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan agar dapat menunjang kesejahteraan masyarakat, peningkatan pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Lebih dari itu adalah untuk menghindari terjadinya konflik di daerah perbatasan yang meningkatkan sumber ancaman keamanan, bahkan kedaulatan wilayah NKRI. Tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan di daerah perbatasan juga sangat penting untuk dilakukan. Ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama pengetahuan peserta didik agar dapat menjadi warga negara yang baik.

Pendidikan Kewarganegaraan

Perkembangan globalisasi merupakan tantangan yang bersifat eksternal dan sebagai warga negara yang baik harus bisa menanggulangi dampak negatifnya. Taniredja, dkk., (2015:141) mengemukakan bahwa hakikat globalisasi sebagai kenyataan subjektif menunjukkan suatu proses dalam kesadaran manusia yang merasakan dirinya sebagai partisipan dalam masyarakat dunia. Sedangkan, dalam kenyataan objektif globalisasi merupakan proses peyempitan ruang dan waktu. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan sangat dibutuhkan untuk dapat membentuk warga negara yang baik sehingga tidak mudah terpengaruh dengan adanya globalisasi.

Kerr (1999:2) mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan mencakup proses penyiapan generasi muda untuk berperan secara aktif dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran disekolah dasar yang digunakan untuk mempersiapkan warganegara muda agar setelah dewasa dapat berperan secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Cogan, 1999:4). Pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat digunakan sebagai pendidikan untuk mempersiapkan dan mengembangkan peserta didik menjadi pribadi yang aktif, berpartisipasi, bertanggung jawab, dan berperilaku baik dalam kehidupan masyarakat. Asumsi tersebut didukung oleh pernyataan dari Cogan & Derricot (1998:13) yang menjelaskan bahwa warganegara adalah bagian dari suatu masyarakat. Dan pendidikan kewarganegaraan memberikan kontribusi untuk mengembangkan karakteristik untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizen*).

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa warga negara merupakan bagian penting dalam suatu negara. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dan digunakan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Dari segi wilayah perbatasan, peserta didik harus dipersiapkan dengan baik agar bertanggung jawab, berpikir kritis dan mampu mem-filter pengaruh-pengaruh negatif dari negara luar.

Tidak hanya terbatas di sekolah dan diintegrasikan dengan mata pelajaran lainnya, Potter (2002:57) menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan juga mengharuskan peserta didik untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan nyata sehingga diperlukan upaya yang sistematis untuk meng-efektifkan praktek pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan juga diperlukan untuk mengembangkan pemahaman generasi muda memahami peran mereka dalam masyarakat dunia. Peserta didik perlu memahami posisi mereka dalam budaya masyarakat dan pengaruh satu negara terhadap negara lainnya (Banks, 2004:133).

Adapun tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (Winataputra & Budimansyah, 2007:71) adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut a) berpikir kritis, kreatif, rasional dalam menanggapi isu kewarganegaraan; b) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; c) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri sesuai dengan karakter ke-Indonesia-an; d) ber-interaksi dengan bangsa lain dalam pencatutan dunia

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

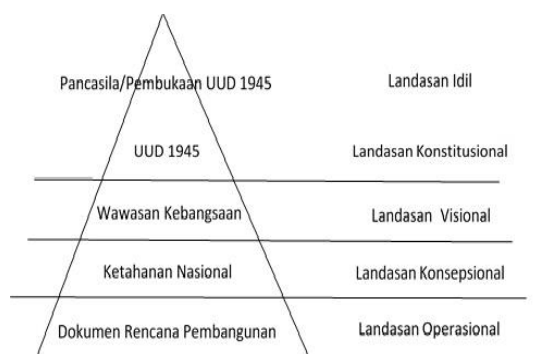
Wawasan Kebangsaan

Istilah wawasan kebangsaan terdiri dari dua kata yaitu "wawasan" dan "kebangsaan". Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wawasan berarti (1) hasil mewawas; tinjauan; pandangan; (2) konsepsi cara pandang. Kebangsaan berarti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa; (2) perihal bangsa; mengenai (bertalian dengan) bangsa; (3) kedudukan (sifat) sebagai orang mulia; (4) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Secara harafiah, dapat diartikan sebagai cara pandang terhadap bangsa dan kesadaran diri sebagai warga suatu negara.

Wawasan kebangsaan menurut Martodirdjo (2008:2) merupakan cara pandang terhadap keberadaan diri suatu bangsa baik itu tentang konteks keberadaannya sebagai entitas yang utuh maupun mengenai interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Konteks ini lebih menekankan kepada bagaimana suatu bangsa memandang dan memaknai pengalaman bangsanya serta tujuan yang akan dicapai.

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang kita terhadap diri sendiri sebagai bangsa yang harus mencerminkan rasa dan semangat kebangsaan (karakter bangsa) dan mampu mempertahankan jati dirinya sebagai bangsa yaitu Pancasila. Dalam kaitannya dengan bernegara, kita memiliki UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, serta wilayah negara yang berbentuk kepulauan. Dapat dikatakan bahwa, pencahangan wawasan kebangsaan memosisikan bangsa secara *futuro-logis*, yang berarti bahwa jangkauan waktu jauh kedepan dan harus *relistic*, *credible*, dan *workable*. Oleh karena itu, penguatan wawasan kebangsaan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh bangsa yang tau jati dirinya atau bangsa yang dapat menampilkan jati dirinya dengan mantap (Bastaman, 2008:22).

Wawasan kebangsaan berkedudukan sebagai visi bangsa yang berhubungan erat dengan perjalanan bangsa menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan kebangsaan adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula.



Sumber: (Winarno, 2010:145)

Gambar 2. Paradigma Ketatanegaraan Indonesia

Wawasan kebangsaan merupakan landasan visional dalam membentuk ketahanan nasional Indonesia. Dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, wawasan nusantara merupakan suatu landasan yang memiliki peran sangat penting dalam proses pembangunan.

Winarno (2010:147) mengkategorikan perkembangan semangat kebangsaan Indonesia dalam beberapa kurun waktu sebagai berikut.

1. Zaman Perintis 1908, yaitu dengan kemunculan Pergerakan Nasional Budi Utomo.
2. Zaman Penegas 1928, yaitu dengan Ikrar Sumpah Pemuda.
3. Zaman Pendobrak 1945, yaitu dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar ketika jaman kerajaan Majapahit disatukan dalam wadah nusantara, maka wawasan kebangsaan yang seyogianya dibangun adalah wawasan nusantara, karena cakupan pengetahuan anak bangsa haruslah bersifat universal di seantero wilayah nusantara. Keluasan pandangan ini kemudian diharapkan dapat membentuk kesamaan niat untuk tetap bersatu dan menjaga keutuhan bersama untuk tetap berada dalam rangkulan dan balutan NKRI (Mahifal, 2011:8).

Adapun wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki berbagai makna sebagai berikut (Markijar, 2017:1).

1. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan.
2. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik.
3. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan.
4. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju.

5. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia.

Wawasan kebangsaan sangat berkaitan erat dengan pengetahuan akan jati diri bangsa Indonesia. Jadi, diharapkan dengan adanya penguatan wawasan kebangsaan dapat membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, berpartisipasi dan berpikir kritis dalam menghadapi isu-isu kewarganegaraan.

Strategi Penguatan Wawasan Kebangsaan

Keterbatasan jarak dan waktu dewasa ini telah dapat dipangkas secara cepat, sehingga mempermudah arus migrasi barang dan jasa maupun manusia telah sedemikian rupa menjamah ranah sosial antar warga Negara di dunia, sehingga proses akulturasi menjadi sebuah keniscayaan yang terjadi dewasa ini. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat Indonesia. Tentunya kenyataan ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang bisa tergantikan oleh budaya global. Tidak hanya itu, dewasa ini semakin berkurangnya pemahaman dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 telah sedemikian nampak berlaku di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Budaya gotong royong dewasa ini cenderung tergantikan dengan budaya konvensasi atau membayar orang untuk menggantikan pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan secara bersama-sama. Budaya musyawarah untuk mufakat cenderung semakin terpinggirkan oleh budaya voting untuk menentukan sebuah keputusan (Mahifal, 2011:2).

Mahifal (2011:1) menjelaskan bahwa membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dilakukan secara parsial. Pembangunan NKRI membutuhkan peran segenap komponen bangsa. Peran tersebut harus dimulai sejak dini dengan memberikan dasar-dasar dan pandangan hidup yang universal. Peran bersama antarkomponen bangsa, pemerintah, swasta dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun dan menggiring semangat dan wawasan kebangsaan.

Melihat kenyataan tersebut, perlu adanya upaya yang dipakai untuk menguatkan wawasan kebangsaan. Mengerucut pada peserta didik, diperlukan pembelajaran yang dapat menciptakan peserta didik yang berkarakter ke-Indonesia-an serta mampu untuk berpartisipasi dan bertanggungjawab terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran pokok sebagai alat untuk menguatkan wawasan kebangsaan peserta didik, terutama yang berdomisili di daerah perbatasan. Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*)

merupakan salah satu instrumen strategis dan fundamental dalam bingkai pendidikan nasional, sebagai media bagi pembentukan karakter bangsa (*nation and character building*) (Zuriah, 2010:207).

Secara sosiologis, Pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan juga mempersiapkan generasi muda yang memiliki atak atau karakter yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Ristekdikti, 2016:24).

Kekuatan bangsa Indonesia dalam konteks sosial-budaya adalah terletak pada kebhinekaannya. Bhineka Tunggal Ika sebagai motto Negara telah menjadi dasar pandangan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat bahwa Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Artinya bahwa warna dan ragam suku merupakan khasanah kehidupan, tetapi jiwa dan semangatnya tetap satu, yaitu berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia dan bertanah air satu tanah air Indonesia. Namun demikian, ketika kebhinekaan tersebut tidak dapat dibina dengan baik, maka bukan tidak mungkin NKRI akan terancam keberadaannya (Mahifal, 2011:4).

Perlu adanya upaya penguatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat perbatasan Indonesia-Timor Leste pada umumnya, dan terkhusus bagi peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang mampu berpikir kritis, bertanggung jawab, serta memiliki wawasan kebangsaan yang baik sehingga mampu menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesimpulan

Globalisasi terus berkembang dan tak dapat dihindari, melainkan harus dihadapi. Oleh karena itu, negara harus menjadi benteng pertahanan yang kuat untuk melindungi kepentingan nasional dan warga negaranya.

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang kita terhadap diri sendiri sebagai bangsa yang harus mencerminkan rasa dan semangat kebangsaan (karakter bangsa) dan mampu mempertahankan jati dirinya sebagai bangsa yaitu Pancasila. Dalam kaitannya dengan bernegara, kita memiliki UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, serta wilayah negara yang berbentuk kepulauan.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dan digunakan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Upaya penguatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat perbatasan Indonesia-Timor Leste pada umumnya, dan terkhusus bagi

peserta didik adalah melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan bagi peserta didik di perbatasan mampu membentuk peserta didik yang mampu berpikir kritis, bertanggung jawab, serta memiliki wawasan kebangsaan yang baik sehingga mampu menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ucapan terima kasih

Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2016, Bung Tok, Bung Qon, Bung Gus, Bung Wewe, dan tak lupa pula kekasih Alexia yang telah memberikan koreksi dan saran serta semangat terhadap karya tulis ini sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Daftar Pustaka

- Banks, J. A. (2004). Teaching For Multicultural Literacy. *Global Citizenship dan Social Justice*. 4 (1). 133-142.
- Branson, M. S. (1998). The role of civic education. *Center for Civic Education*. 5-9.
- Bastaman, H. D. (2008). *Membangun kembali jati diri bangsa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Cogan, J. J. (1999). Developing the Civic Society: The Role of Civic Education. 4-8.
- Cogan, J. J. & Derricot, R. (1998). Citizenship education for the 21st century. 13-16.
- Kerr, D. (1999) Citizenship Education: An International Comparison. *England National Foundation for Educational Research-NFER*. 2-7.
- Mahifal. (2011). Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pembinaan Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Pedagogik*. 1-16.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2231806.
- Markijar. (2017). Wawasan Kebangsaan Indonesia. Diunduh 28 Oktober 2017, from: <http://www.markijar.com/2017/06/wawasan-kebangsaan-indonesia-lengkap.html>.
- Marsetio. (2012). Konstruksi Marginalitas Masyarakat Perbatasan, Studi Kasus Kepulauan Natuna. Disertasi, tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Martodirdjo, H. S. (2008). Implementasi Pancasila dalam Menumbuhkan wawasan kebangsaan. *Jurnal Ketahanan Nasional*. 13 (2). 1-14.
- Muta'ali, L., Marwasta, D., & Christanto, J. (2014). *Pengelolaan wilayah perbatasan NKRI*. Yogyakarta: Gadjah Madah University Press.

- Poespowardojo, S. (2003). Dinamika Dan Implikasi Etis Wawasan Kebangsaan Dalam Menyongsong Hari Depan Indonesia. *Jurnal Ketahanan Indonesia*. 8 (2), 1-6.
- Potter, J. (2002). The Challenge of Education For Active Citizenship. *Education + Training*, 44 (22), 57-66.
- Prasojo, Z. H. (2013). Dinamika masyarakat lokal di perbatasan. *Walisongo*. 21 (2). 417-336.
- Soebhan, S. R., Jati, W. R., Andriana, N., Noor, F., & Adam, A. W. (2017). Relasi nasionalisme dan globalisasi kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- RISTEKDIKTI. (2016). Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Taniredja, T., Sriwanto, S., Sutomo, Ma'mur, B., Purbomartono, C., Muchtasjar, B., Afandi, M., Harmianto, S., & priyanto, E. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Winarno. (2010). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winataputra, U. S. dan Budimansyah, D. (2007). *Civic Education*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana UPI.
- Wuryandari, G., Pamungkas, C., Noor, F., & Hadiwinata, B. S. (2009). *Keamanan di perbatasan Indonesia-Timor Leste*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuriah, N. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Sebagai Wahana Pendidikan Hukum dan Kesadaran Berkonstitusi. *Wawasan Hukum*. 23 (2). 2017-222.